

ABSTRAK

KETERLIBATAN DINAS PERMUKIMAN KOTA MEDAN DALAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DI DAERAH BERDASARKAN PERDA KOTA MEDAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Indra Gunawan*

Dalam hal pencegahan dan munculnya permukiman kumuh baru di kota Medan, maka Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam perspektif peraturan perundang-undangan, peran Dinas Permukiman Kota Medan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, serta hambatan yang dialami pemerintah kota medan dan solusi dalam mencegah berdirinya perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kota medan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*ase approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum dengan melakukan telaah pustaka dan wawancara..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam perspektif perundang-undangan adalah merupakan kewajiban yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara legal-formal, ketentuan di atas menjadi landasan hukum bagi rakyat Indonesia untuk memperoleh kondisi tempat tinggal yang baik dan sehat, serta layak huni. Sebagai tindakan nyata Pemerintah harus dilandasi dengan undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai instrumen hukum. Dalam ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah, sehingga terbitlah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh untuk mengatasi persoalan permukiman kumuh di Kota Medan. Peran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, Pelaksanaan administrative, serta Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang undangan.

Kata Kunci: Dinas Perumahan dan Permukiman, Pencegahan, Perumahan dan Permukiman Kumuh, Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2019

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

ABSTRACT
**INVOLVEMENT OF THE MEDAN CITY SETTLEMENT SERVICE IN
REGIONAL SETTLEMENT DEVELOPMENT BASED ON MEDAN CITY
REGIONAL REGULATION NUMBER 4 OF 2019 CONCERNING PREVENTION
AND QUALITY IMPROVEMENT OF SLUM HOUSING AND SLUM HOUSING**

Indra Gunawan*

In terms of prevention and the emergence of new slum settlements in the city of Medan, the Regional Government issued a policy as outlined in the Medan City Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Prevention and Quality Improvement of Slum Housing and Slum Settlements.

This study aims to identify and analyze the prevention and improvement of the quality of slum housing and slum settlements in the perspective of laws and regulations, the role of the Medan City Settlement Service in organizing housing and residential areas, as well as the obstacles experienced by the Medan city government and solutions in preventing the establishment of slum housing and slums in the city of Medan.

This study uses empirical normative juridical methods using a statutory approach (ase approach) and a legal concept analysis approach by conducting literature reviews and interviews.

The results of the research show that: Prevention and improvement of the quality of slum housing and slum settlements in a statutory perspective is an obligation that has been mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Legally-formally, the above provisions are the legal basis for the people of Indonesia to obtain good and healthy living conditions, as well as livable. As a concrete action the Government must be based on law, namely Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Residential Areas as a legal instrument. In the provisions of Article 98 paragraph (3) of Law Number 1 of 2011 regarding the determination of the location of slum housing and slum settlements carried out by the Regional Government with Regional Regulations, so that Medan City Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Prevention and Quality Improvement of Slums and Slum settlements to overcome the problem of slum settlements in the city of Medan. The role of the Medan City Housing and Settlements Agency in the administration of housing and settlement areas is as the Formulation of government affairs policies in the housing and settlement area sector, Implementation of government affairs policies in the housing and residential area sector, Implementation of evaluation and reporting of government affairs in the housing and settlement area sector, Administrative implementation, as well as Implementation of co-administration tasks based on laws and regulations.

Keywords: Department of Housing and Settlements, Prevention, Housing and Slums, Regional Regulation of the City of Medan No. 4 of 2019

**Students of the Postgraduate Program in the Law Program at the Islamic University of North Sumatra.*